

**MODEL HUBUNGAN INTI-PLASMA PADA INDUSTRI AKUAKULTUR TAMBAK UDANG
A RELATIONSHIP MODEL OF NUCLEAR-PLASMA IN AQUACULTURE INDUSTRY OF
PRAWN POND**

Oleh:

Purnama Sukardi¹, Agus Margiwiyatno², Anisur Rosyad², Tobari², Jarot Santoso³,
dan Nurul Anwar⁴

¹Program Studi Akuakultur, Program Sarjana Kelautan dan Perikanan, ²Fakultas
Pertanian, ³Fakultas Sosial dan Politik, dan ⁴Fakultas Ekonomi, Universitas Jenderal
Soedirman,

Jl. dr. Soeparno Karangwangkal Purwokerto

(Diterima: 27 Pebruari 2006, disetujui: 3 April 2006)

ABSTRACT

The relationship between nuclear and plasma in aquaculture businesses as one of several agricultural businesses were observed in two regions, i.e., Lampung and West Java. CP Bahari and Triasta Citarate Ltd. were used as a sample of this relationship. The results showed that the education level of aqua-culturist was 80% senior high school and 20% secondary school. CP Bahari (nuclear) had already fulfilled the duties to the plasma aqua-culturist. However, cooperation (Bima Utama) as a channelling agent did not work properly. There was not self-help group; the only group was a neighborhood from which the company controlled aqua-culturist. Extension from Fisheries Agency Office was not properly done. Local government autonomy resulted in too many tax regulations from which overlapping taxes had been happened. Aqua-culturist cooperation (KUD) did not work as in agreement with Central Bank of Indonesia. The information of plasma credit was not clear as well as the balance position of their money. In Triasta Citarate, the existing of KUD was just to speed up the process of money transfer to the nuclear.

PENDAHULUAN

Hubungan inti-plasma adalah suatu model hubungan kerjasama yang diharapkan dapat terjadi seperti harmonisnya inti dan plasma dalam sebuah sel. Suatu sel akan berkembang dengan baik apabila inti dan plasma bekerja secara bersama menurut fungsinya masing-masing. Model hubungan inti-plasma diharapkan berinteraksi dan bersinergi dengan baik seperti layaknya sebuah sel yang sehat dapat berganda dan berkembang.

Bank Indonesia mendapat mandat dari rakyat Indonesia untuk mengembangkan usaha guna menunjang pembangunan nasional bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan

meman-tapkan kestabilan ekonomi, Bank Indonesia mempunyai peran strategis dalam pencapaian pembangunan tersebut. Oleh karena itu, Bank Indonesia menyediakan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) bagi sektor berprioritas tinggi, antara lain bagi usaha perkebunan dan perikanan. KLBI diberikan untuk menunjang program pemerintah bagi pengembangan perkebunan dan perikanan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), yaitu pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti, yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu

Selain untuk sektor berprioritas tinggi, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, diberikan juga fasilitas KLBI bagi usaha kecil yang bergabung dalam koperasi yang disebut dengan nama KLBI skim Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA-Umum). Pemberi-an KLBI skim KKPA-Umum ini diberikan juga antara lain melalui pola hubungan inti-plasma. Krisis moneter yang dilanjutkan dengan krisis ekonomi sejak Juli 1997, yang diperburuk oleh pengelolaan perekonomian dan sektor usaha yang kurang efisien serta sistem perbankan yang rapuh, telah membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan, antara lain aspek sosial dan ekonomi. Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat dan terjadinya gejolak sosial di berbagai daerah di Indonesia berupa kekacauan, pengrusakan, dan perampasan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Peristiwa ini memicu pelaksanaan hubungan inti-plasma yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penelitian guna melihat lebih jauh pola hubungan inti plasma di sektor agribisnis, khususnya di bidang perikanan, yaitu akuakultur (tambak udang).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan mengevaluasi; jenis keragaman hubungan inti-plasma, fungsi dan peran masing-masing pihak yang terkait dalam hubungan inti-plasma, kelebihan dan kekurangan dalam hubungan inti-plasma, permasalahan yang timbul baik dari intern maupun ekstern dalam hubungan inti-plasma dan **memberikan usulan model atau pola hubungan inti-plasma yang memadai dan**

sesuai, dalam arti saling menguntungkan kedua belah pihak, dengan harapan dapat dijadikan sebagai model atau pola hubungan antara inti dan plasma di masa mendatang. Fokus penelitian ini pada 4 (empat) aspek yaitu aspek pertanggung-jawaban, perkreditan, lingkungan sosial dan budaya, serta kebijakan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode survei dengan metode sampling dalam pengumpulan data primer. Teknik sampling yang digunakan ada dua, yaitu: (1) untuk peta-ni plasma digunakan teknik random sampling; dan (2) untuk lembaga digunakan teknik purposive sampling dengan menitikberatkan pada keterlibatannya dalam program PIR.

Lokasi Penelitian

Komoditas yang diteliti telah ditentukan yaitu: budidaya udang yang diusahakan dalam Pola PIR, sedangkan lokasi penelitian ditentukan secara purposive di perusahaan budidaya udang Centra Pertiwi Bahari (CP. Bahari) Lampung dan PT Triasta Citarate, Jawa Barat.

Sampel Penelitian

Pemilihan sampel pada di lokasi penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan diskusi dengan Bank Indonesia, yaitu untuk PIR budidaya udang, pada wilayah kajian dipilih sebanyak satu perusahaan inti dengan mempertimbangkan perolehan KLBI terbesar. Pemilihan responden dilakukan secara purposive dan/atau secara acak pada beberapa komponen yang terlibat dalam pelaksanaan PIR, yaitu:

1. KLBI dan Bank Pelaksana
KLBI dan Bank Pelaksana yang

2. Koperasi Unit Desa (KUD)
KUD yang dipilih sebagai sampel penelitian adalah KUD yang terlibat dalam hubungan inti-plasma pada perusahaan inti yang terpilih sebagai sampel penelitian. Masing-masing perusahaan inti dipilih 1 (satu) KUD.
3. Petani Plasma dan tokoh masyarakat
Petani plasma yang terpilih sebagai sampel penelitian adalah petani yang ikut terlibat dalam proyek hubungan inti-plasma, baik yang menjadi anggota maupun yang bukan anggota KUD. Pemilihan sampel untuk petani plasma dilakukan secara acak, tiap perusahaan inti diambil 5 petani. Tokoh masyarakat, seperti pendiri koperasi, yang dijadikan sampel penelitian adalah pemuka masyarakat yang berada di lokasi proyek yang dijadikan sampel penelitian.
4. Instansi/Dinas Terkait
Instansi/Dinas terkait yang dijadikan sampel penelitian antara lain pejabat Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan di daerah yang terpilih sebagai sampel penelitian.

Jumlah responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 18 yang terdiri atas Inti (2), KUD (2), Plasma (10), Bank Pelaksana (2), dan Instansi terkait (2).

Jenis Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden melalui wawancara dengan alat bantu pedoman wawancara (interview guide), yaitu garis besar materi wawancara yang dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti dalam melakukan wawancara di lapangan. Data sekunder dikumpulkan dari instansi yang terlibat dalam program PIR, hasil penelitian yang berkaitan dengan hubungan inti-plasma, maupun dokumen lain yang sesuai dengan

penelitian ini. Data ini digunakan untuk mendukung informasi yang diperoleh dari data primer.

Analisis Data

Data hasil survei diarahkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pola hubungan inti-plasma, yang dilakukan dengan menganalisis aspek tersebut. Keragaan ekonomi dan kesejahteraan, standar yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pendapatan (tinggi bila melebihi Upah Minimum Kabupaten atau UMK dan rendah bila di bawah UMK). Kemanfaatan proyek secara keseluruhan, dilihat Pareto keefisienannya. Analisis penghambat dan pendorong digunakan untuk mengetahui hubungan inti-plasma program KKPA maupun Non-KKPA dan hubungan kemitraan antara perusahaan dan mitra-tani. Analisis ini merupakan modifikasi dari Analisis Medan Kekuatan (Force Field Analysis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan, perhatian penelitian ini pada 4 (empat) aspek, yaitu aspek pertanggungjawaban, perkreditan, lingkungan sosial dan budaya, serta kebijakan pemerintah.

Aspek Pertanggungjawaban

Inti

Pada program Tambak Inti Rakyat (TIR) udang, yang bertindak selaku inti, yaitu PT CP Bahari dan PT Triasta Citarate, yang masing-masing berlokasi di Propinsi Lampung dan Jawa Barat. Temuan lapangan di daerah tambak plasma CP Bahari tampak kawasan pertambakan yang dibangun oleh perusahaan inti dilengkapi dengan sarana dan prasarana kehidupan desa, seperti jalan, perumahan, tempat ibadah,

memberikan jaminan hidup untuk kebutuhan sehari-hari plasma sebelum tambak berproduksi maupun sesudahnya. Besarnya biaya hidup adalah Rp700.000,00 dan plasma masih dapat mengajukan tambahan biaya hidup yang besarnya disesuaikan dengan nilai jual udang yang diperoleh. Selain itu, plasma masih mendapatkan biaya hidup progressive selama 6 (enam) bulan, apabila keuntungan dalam panen dapat dicapai dan besarnya ditentukan berdasarkan selisih hasil penjualan dengan biaya produksi (Tabel 1).

Selain biaya hidup, sarana produksi seperti pakan udang dan pupuk, dipenuhi oleh inti melalui program paket, yang besarnya tergantung pada perkembangan produktivitas tambak. Keterbukaan (transparency) merupakan masalah yang dikeluhkan oleh plasma, seperti penghitungan penggunaan daya listrik yang digunakan plasma, penentuan harga udang, dan harga pakan udang, yang masih merupakan monopoli inti. Sampai saat ini, keluhan plasma tidak bergema secara nyata. Hal ini mungkin karena setiap bulannya plasma sudah mendapatkan penghasilan yang cukup layak untuk kehidupannya.

Di dalam hubungannya dengan kredit, plasma pada umumnya tidak mengetahui jenis kredit yang diterimanya. Plasma umumnya hanya mengetahui berapa hutang yang telah dicicil dalam panennya. Pada

penghitungan beban kredit baik KKPA atau kredit komersial, plasma tidak mendapatkan penjelasan yang cukup dari inti. Demikian juga dalam restrukturisasi KKPA (perubahan KKPA menjadi Kredit Komersial umum yang dilakukan pada tahun 1996) tidak diterangkan secara jelas kapan dan berapa persen perubahan suku bunganya oleh inti kepada plasma maupun kepada KUD. Program KKPA hanya diketahui oleh tokoh masyarakat dan pengurus koperasi.

Sejak awal, inti telah mengadakan pembinaan melalui pelatihan terhadap calon petambak selama satu bulan, kemudian pada saat akhir calon dites fisik, kesehatan, dan teknik budidaya. Di dalam penanganan selanjutnya, inti mempunyai divisi yang disebut Divisi Aqua, yang dalam strukturnya mempunyai manajer, asisten manajer, kepala seksi, dan supervisor.

Divisi khusus yang dibentuk untuk membina kegiatan sosial, disebut Pengembangan Komunitas (Community Development), disebut oleh mereka CD. CD bertugas memantau masalah yang timbul dan menyelesaikannya sebatas kemampuan CD. Berdasarkan kedua jenis pembinaan tersebut di atas, inti sebagai pembina telah melaksanakan fungsi dan tugasnya secara baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk pembinaan teknis oleh Divisi Aqua dan sosial oleh CD, semua plasma sampel (100%)

Tabel 1. Biaya Hidup Progressive Berdasarkan Hasil Panen

Hasil Panen (rupiah)	Jumlah Biaya Hidup Tambahan Progressive (rupiah/bulan)
0 – 8.000.000,00	50.000,00
8.000.000,00 – 15.000.000,00	100.000,00
15.000.000,00 – 25.000.000,00	250.000,00
> 25.000.000,00	500.000,00

(equity) merupakan kunci dalam kemitraan. Perusahaan yang merupakan corporate dengan sumberdaya manusia dan modal yang besar dan kuat, tidak seimbang dengan sumber daya yang dimiliki plasma, sehingga harus ada per-lakuan tertentu agar dapat mencapai kesetaraan dalam arti luas.

Kedua belah pihak inti-plasma sebetulnya sudah merasakan dan menyadari bahwa perlu ada saling ketergantungan (inter-dependency) dalam kerjasama keduanya. Namun dalam pelaksanaannya, saling ketergantungan ini belum terwujud. Dengan segala kelebihan dan kekuatannya, inti sebetulnya mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk memunculkan isu saling ketergantungan dalam komunitas petambak. Pada komunitas tertutup, seperti kawasan tambak (real estate tambak) ini akan lebih mudah dididungkan kebersamaan dan saling ketergantungan.

Salah satu perusahaan inti, yaitu PT. Triasta Citarate (TC), pada tahun 1999 bekerjasama dengan Koperasi Pengembangan Kelompok Petani Intensifikasi Tambak (Kopbangkit) dalam pengajuan kredit KKPA. Namun pada perjalanannya, terjadi kesalahpahaman antara inti dengan Kopbangkit mengenai pengambilan dana kredit yang telah disetujui bank. Selanjutnya perusahaan inti bekerjasama dengan koperasi lain Tani Tambak Sinar Laut (KTTSL), sebuah koperasi bentukan inti yang anggotanya adalah pegawai inti. Bank Pelaksana dalam proyek TIR ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang mencairkan dana KLBI sebesar 38 milyar rupiah untuk mendanai 76 anggota dengan 38 petak tambak dan nilai kredit sebesar 50 juta rupiah setiap anggota.

Menurut inti, tambak yang dapat

diwujudkan baru 10 petak tambak, panen pertama 2,7 ton dengan nilai uang sebesar Rp200.000.000,00 dan panen kedua sebesar 7,8 ton dengan nilai rupiah sebesar Rp350.000.000,00. Sampai dengan survei dilakukan, tambak telah dibiarkan terlantar selama 5 bulan, karena plasma dan KUD fiktif dalam arti semua anggota dan pengurusnya merupakan pegawai perusahaan inti. Kecendrungannya hubungan inti-plasma, yaitu umumnya inti akan menjadi "tengkulak baru", karena posisi inti yang terlalu kuat untuk menentukan semua kegiatan mulai dari input sampai dengan pemasaran hasil (Bachriadi, 1995). Kesewenangan inti pada plasma terlihat pada PT Triasta Citarate yang mengganti KUD sesuai dengan keinginannya.

Plasma

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat pendidikan plasma sampel 80% SLTA dan 20% SLTP. Semua plasma sampel (100%) mengetahui persyaratan untuk menjadi plasma. Mereka juga mengetahui status kepemilikan lahan, luas lahan yang diterima, dan dapat menduga waktu pelunasan, serta mengerti bahwa tambak akan menjadi hak milik plasma yang bersertifikat setelah kredit lunas baik dari bank maupun inti. Plasma juga mengetahui hak mereka dalam memperoleh lahan, kredit, dan menerima pembinaan dari inti. Tanggungjawab plasma adalah mengerjakan tambak sesuai dengan teknologi PT. CP Bahari serta mengembalikan kredit yang telah diterima untuk melunasi pinjamannya kepada Inti dan Bank Pelaksana melalui pemotongan hasil panennya.

KUD

Pada KKPA untuk proyek TIR yang di-amati terdapat dua KUD

lemah. Kedua KUD tersebut tidak pernah menerima haknya berupa fee sebesar 2% seperti yang tertulis dalam ketentuan KKPA, yang harus segera diselesaikan.

Pada penyaluran kredit KKPA, KUD Bina Utama tidak dilibatkan sebagaimana semestinya. Dana kredit disalurkan langsung oleh bank pelaksana (Bank Niaga, BII) kepada Inti (CP Bahari). Kondisi seperti ini sebenarnya diketahui oleh pengurus koperasi, bahkan pengurus koperasi mengetahui perjanjiannya. Namun, pengurus tidak berdaya karena ternyata dalam perjanjian inti-plasma tidak tercantum pihak KUD Bina Utama. Dokumen KKPA juga tidak ada di KUD. Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat yang mengetahui banyak tentang hal tersebut telah meninggal dunia. Dilihat dari kenyataan tersebut, KUD tidak berperan dan tidak mempunyai tanggung-jawab secara hukum terhadap hubungan inti-plasma. Bentuk skim seperti ini, maupun skim lain Mikro Mitra Mina (M3), Ventura, dan Asuransi Nelayan juga mengalami hambatan lain. Oleh karena itu, perlu dikaji skim lain yang tepat yang dapat diterima nelayan dan pembudidaya ikan untuk dikembangkan (Nikujuluw, 2001).

Kelompok Petambak

Tidak ada kelompok secara mandiri yang dibentuk oleh plasma, karena kelompok yang ada merupakan kelompok rukun tetangga (RT), yang bertugas membantu inti dalam mengawasi plasma, seperti keluar masuk lokasi dan ikut mengatasi masalah teknis bersama CD. Plasma tidak mempunyai kelompok karena perusahaan cenderung ingin menafikan kehadiran kelompok swadaya (self help group). Perusahaan agak kuatir dengan timbulnya kelompok swadaya, karena

kelompok ini dianggap sebagai *pressure* yang akan sangat membahayakan perusahaan.

Instansi

Dinas Perikanan melakukan pembinaan secara tidak rutin dalam satu bulan, dengan materi pembinaan berkisar pada informasi tentang kebijakan yang ditempuh pemerintah, seperti penetapan harga udang yang dilakukan bersama inti. Pembinaan teknis tidak dilakukan oleh dinas. Sementara itu, Pemerintah Daerah cenderung menitikberatkan perhatiannya kepada permasalahan yang berhubungan dengan Otonomi Daerah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak air permukaan, pajak air tanah, pajak penangkal petir, dan label perusahaan.

Bank

Bank pelaksana dalam TIR adalah Bank Niaga, Bank International Indonesia, dan Bank Muamalat Indonesia. Bank pelaksana cenderung hanya berhubungan dengan inti. Pembinaan terhadap KUD tidak terjadi baik di Lampung bagi KUD yang bermitra dengan CP Bahari maupun di Jawa Barat bagi KUD yang bermitra dengan PT Triasta Citarate. Demikian pula, pembinaan oleh bank pelaksana terhadap plasma tidak dilakukan. Belum adanya keten-tuan yang mengatur mekanisme pengembalian sisa lebih (saldo plus) yang menjadi hak plasma atas pelunasan hutang plasma kepada inti dan bank. Masalah ini menjadi salah satu kendala dalam pola hubungan Inti-plasma. Pada petambak di Lampung terungkap bahwa kredit yang disediakan oleh bank kepada plasma sebesar Rp145 juta per tambak yang luasnya 0,5 ha, sedangkan pada petambak di Jawa Barat mereka mendapatkan kredit maksimum Rp50

Pengaruh Proyek terhadap Masyarakat Sekeliling

Pada umumnya, masyarakat sekitar melihat proyek merupakan kegiatan yang sangat membantu untuk meningkatkan peng-hasilan dan kesejahteraan mereka. Beberapa lapangan pekerjaan baru, seperti persewaan mobil, ojek, dan warungan, bermunculan di sekitar kawasan proyek. Manfaat lain yang dapat dirasakan oleh masyarakat, yaitu pra-sarana dan sarana transportasi bertambah baik, tersedia sarana pendidikan dan kesehatan. Di samping manfaat langsung yang dapat dirasa-kan oleh masyarakat, kehadiran proyek mem-percepat perkembangan daerah. Sebelumnya, lokasi proyek termasuk daerah terisolir; setelah proyek dibangun menjadi terbuka, sehingga pergerakan masyarakat cukup tinggi. Oleh sebab itu, masyarakat mengharapkan agar proyek terus dikembangkan.

Pengaruh Krisis terhadap Proyek

Hubungan inti-plasma tampaknya semakin baik dengan adanya krisis. Kedua belah pihak terutama plasma menyadari bahwa apabila terjadi hubungan yang tidak harmonis antara keduanya dan berakhir, seperti yang pernah terjadi di tempat lain, plasma akan merugi sendiri. Pada PT. CP. Bahari, hubungan inti-plasma cukup harmonis, yang ditandai dengan tidak adanya demonstrasi petambak, seperti pada PT Dipasena, sehingga menjadikan ketenangan masyarakat sekitar. Langkah yang ditempuh inti, seperti menaik-kan biaya hidup, memberikan kesempatan usulan tambahan biaya hidup, dan biaya hidup progresif, telah cukup menyumbang kepada ketenangan hidup plasma. Keduanya tampak menyadari, karena hubungan yang tidak

har-monis dapat menyebabkan pergolakan, yang akan menyebabkan masyarakat pendukung aktivitas di sekitar proyek menyingkir dan proyek akan berakhir dengan tidak baik.

Aspek Kebijakan Pemerintah

Program TIR diatur dalam SK Menteri Pertanian No. 334/Kpts/Ik 210/6/1986 yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak baik inti maupun plasma. Pada pelaksanaan di daerah, muncul kebijakan Pemerintah Daerah berupa penetapan retribusi yang mulai dirasakan sejak berlakunya otonomi daerah. Sebagai contoh, retribusi untuk pemasangan penangkal petir dan air permukaan. Keleluasaan otonomi daerah dengan menaikkan PAD secara berlebihan akan sangat melemahkan perorangan atau kelompok dalam berusaha. Oleh sebab itu, kebijakan seperti ini perlu ditinjau ulang apabila pengembangan usaha pertambakan di-jadikan prioritas utama. Model penggabungan antara commercial fishing, ocean recreation, marine transportation aquaculture dan seafood marketing di Hawaii yang berhasil perlu dipelajari para penentu kebijakan. Demikian pula industri yang bertumpu pada kesehatan pantai dan lingkungan laut di California perlu dipelajari untuk kemungkinan dapat diterapkan di Indonesia guna meningkatkan revenue generating (Hale, 2000; Holthus, 2000; Tomboelu et al., 2000).

Analisis Pola Hubungan

Meskipun hasil survei menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan yang dikaji dalam PIR udang dengan skim KKPA cukup berhasil, namun pencapaian keberhasilan tersebut dipandang masih belum optimum. Oleh karena itu, pada bagian ini, analisis dipusatkan untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan

ditumpuk ke dalam pokok pinjaman.

Aspek Perkreditan

Kebijakan dan Ketentuan Penyaluran Kredit

Sesuai dengan ketentuan program KKPA, dana kredit untuk usaha tambak udang pola TIR merupakan kredit yang diper-untukkan bagi para anggota koperasi. Oleh karenanya, pada pola TIR, kebijakan yang diberlakukan dan ketentuan di dalamnya sama seperti halnya pada jenis usaha yang lain. Seperti halnya pada petani plasma yang lain, plasma tambak tampaknya tidak mengetahui dengan baik tentang prosedur pengajuan kredit dan penyalurannya serta berapa besarnya beban kredit yang ditanggungnya.

Prosedur Penyaluran Kredit

Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada KKPA penyaluran kredit harus me-libatkan tiga komponen penting, yaitu Bank Pelaksana, inti (perusahaan), dan KUD. KUD dalam hal ini berfungsi sebagai pemohon kredit, yang untuk selanjutnya disalurkan kepada anggotanya (petani plasma). Pada pelaksanaannya, dana dari bank pelaksana langsung diberikan kepada inti tanpa melalui KUD. Penyimpangan ini diketahui oleh pihak KUD, namun tanpa disertai tindak lanjut yang berarti dari KUD. Besarnya jumlah kredit maksimum pembiayaan tambak udang dengan menggunakan Skim KKPA adalah Rp50 juta. Namun demikian, dalam praktik di lapangan, beban kredit yang harus ditanggung plasma dapat mencapai Rp145 juta (Rp50 juta dari KKPA dan selebihnya merupakan pinjaman dengan menggunakan skim kredit komersial).

Pengawasan dan Pengembalian Kredit

Plasma tidak dapat mengetahui pengembalian kredit yang dilakukan oleh inti kepada bank pelaksana, demikian pula peng-awasannya.

Permasalahan yang harus segera diselesaikan adalah plasma yang melunasi hutangnya kepada inti dan bank, kemudian akan mengambil semua saldo plusnya di bank, sampai sekarang belum ada peraturan yang dapat digunakan oleh pihak terkait. Pengawasan kredit pada usaha tambak terlihat lebih ketat, yang ditunjukkan adanya perhatian bank yang besar pada usaha ini. Hal itu didasari oleh kesadaran bank bahwa pada usaha tambak udang, modal yang ditanam relatif besar dan risiko yang ditanggung akibat kegagalan yang mungkin terjadi juga besar. Di samping meminta laporan perkembangan kepada petambak, bank juga membuka counter transaksi perbankan di daerah pertambakan. Hal ini di samping untuk memberikan pelayanan, juga sebagai salah satu bentuk pengawasan.

Aspek Lingkungan Sosial dan Budaya

Pandangan Lingkungan Sosial

Proyek TIR dipandang banyak mem-berikan manfaat bagi masyarakat luas. Hal ini karena dengan dibukanya tambak, ratusan penduduk setempat terlibat di dalamnya. Pen-duduk yang semula sebagai perambah hutan berubah menjadi petambak, walaupun sebagian kecil (5 dari 2000 petambak) di antara mereka menjual tambaknya ke orang lain dan kembali sebagai perambah hutan, hal ini disebabkan perubahan habit dari pemburu menjadi pembudidaya akan membutuhkan waktu yang lama dan cukup sulit (Arifin et al., 2002; Myint dan Monintja, 2002). Masyarakat pantai dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu nelayan, petambak, dan masyarakat umum. Masing-masing kelompok mempunyai ciri berbeda dalam upaya mengelola sumberdaya pantai. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian dan kebijakan tersendiri untuk dapat meng-

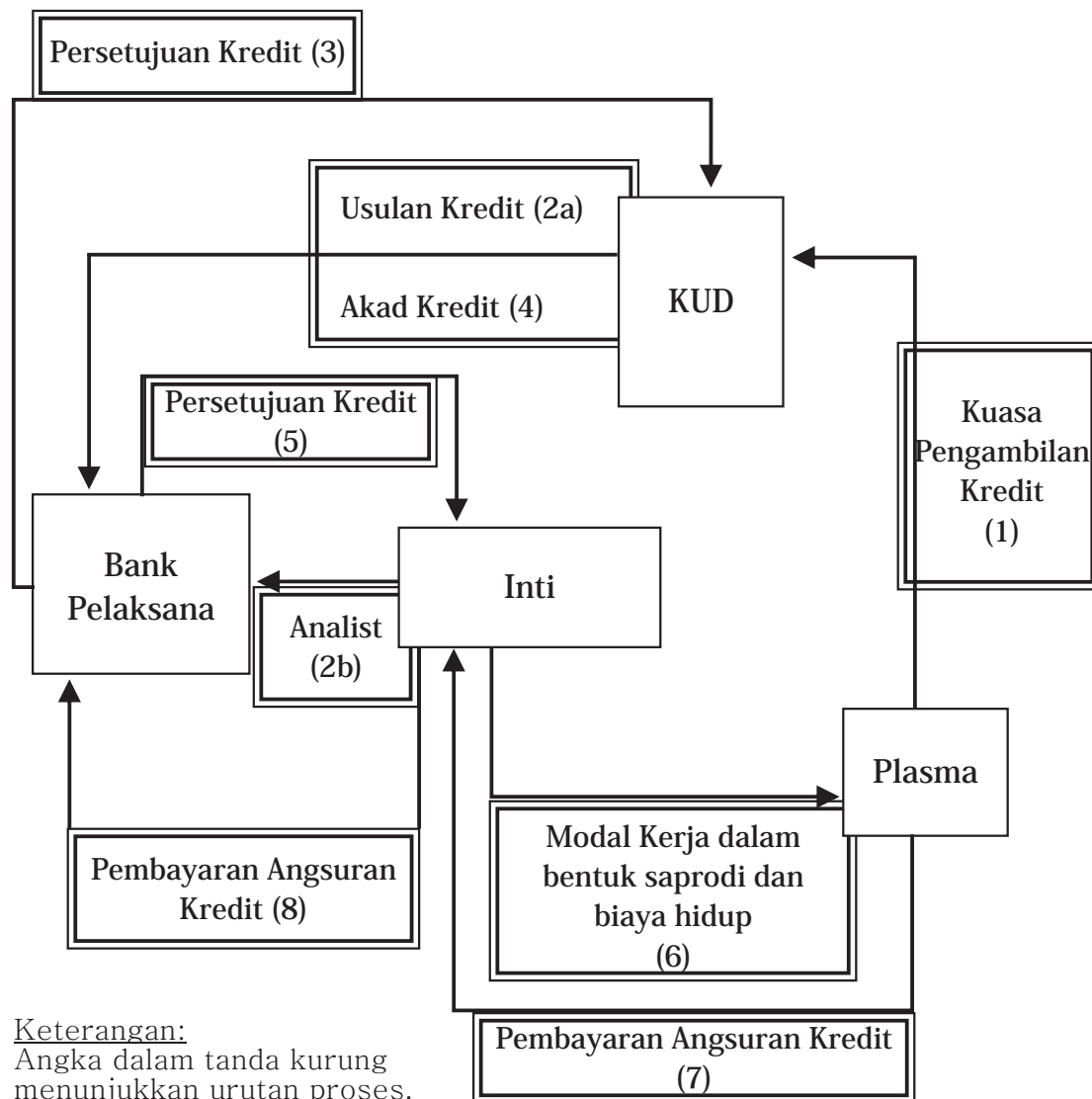
yaitu hubungan dalam perkreditan, pembinaan, dan penjualan hasil produksi plasma.

Pola Hubungan dalam Perkreditan

Pada Gambar 1. disajikan pola hubungan inti-plasma pada TIR udang dalam aspek perkreditan yang saat ini berjalan. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa KUD hanya berperan sebagai lembaga yang hanya dimanfaatkan untuk pencairan kredit saja. Pada temuan lapangan telah diidentifikasi bahwa tidak berperannya KUD lebih disebabkan oleh lemahnya

motivasi, yang ditandai dengan tidak pernah ada pertemuan rutin dan juga tidak berperan secara aktif dalam pelaksanaan TIR. Hal tersebut diantisipasi oleh inti dengan mengambil alih pengelolaan kredit dan bahkan pada perjanjian yang terkait dengan kredit antara inti dan plasma, KUD tidak disebutkan sama sekali.

Pada kondisi tersebut, posisi inti semakin kuat dan KUD menjadi termarginalkan. Posisi yang kuat tersebut pada gilirannya mendorong inti untuk cenderung mengambil



Gambar 1. Kondisi Pola Hubungan pada TIR Udang dalam Aspek Perkreditan.

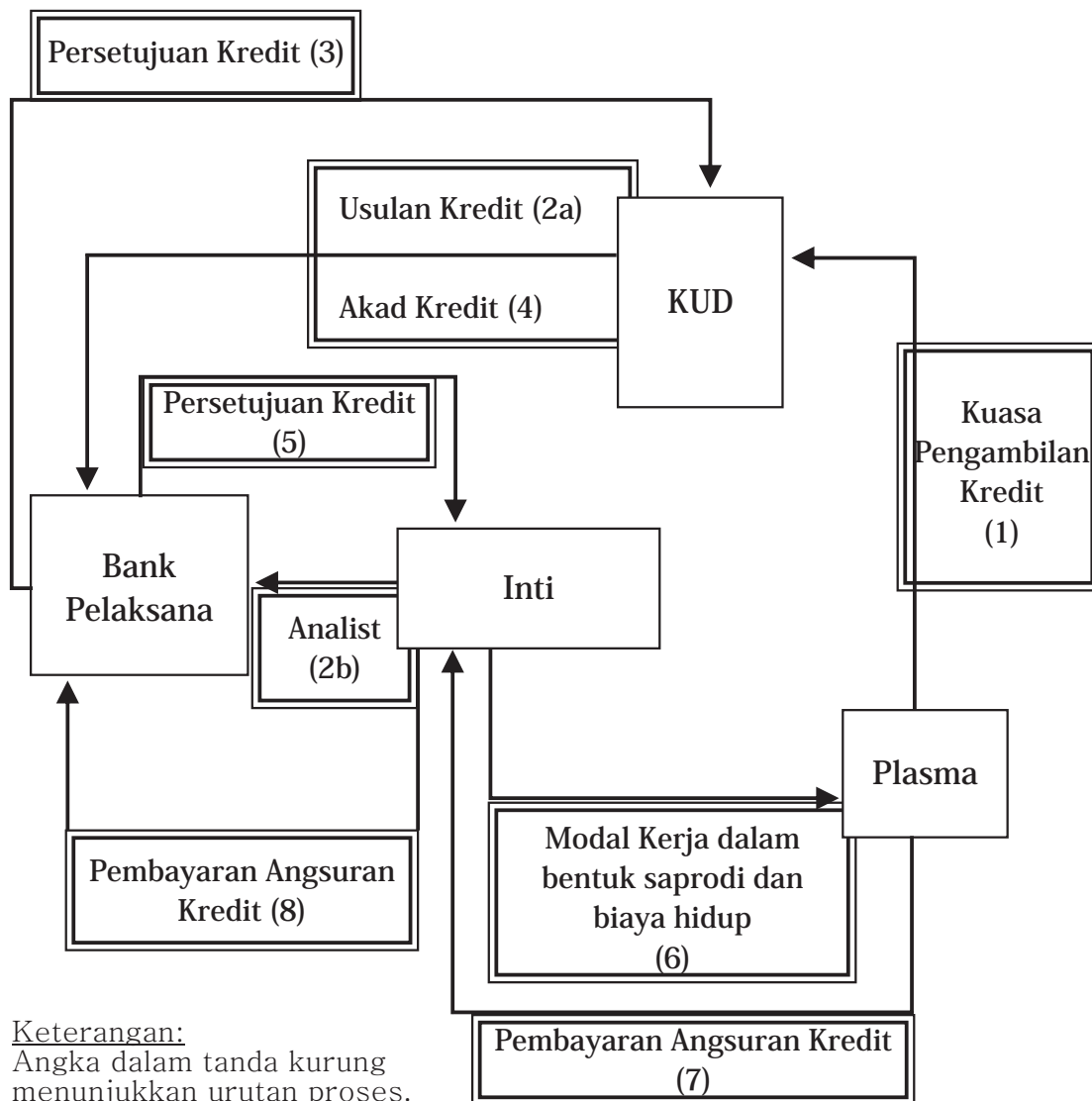
yaitu hubungan dalam perkreditan, pembinaan, dan penjualan hasil produksi plasma.

Pola Hubungan dalam Perkreditan

Pada Gambar 1. disajikan pola hubungan inti-plasma pada TIR udang dalam aspek perkreditan yang saat ini berjalan. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa KUD hanya berperan sebagai lembaga yang hanya dimanfaatkan untuk pencairan kredit saja. Pada temuan lapangan telah diidentifikasi bahwa tidak berperannya KUD lebih disebabkan oleh lemahnya

motivasi, yang ditandai dengan tidak pernah ada pertemuan rutin dan juga tidak berperan secara aktif dalam pelaksanaan TIR. Hal tersebut diantisipasi oleh inti dengan mengambil alih pengelolaan kredit dan bahkan pada perjanjian yang terkait dengan kredit antara inti dan plasma, KUD tidak disebutkan sama sekali.

Pada kondisi tersebut, posisi inti semakin kuat dan KUD menjadi termarginalkan. Posisi yang kuat tersebut pada gilirannya mendorong inti untuk cenderung mengambil



Gambar 1. Kondisi Pola Hubungan pada TIR Udang dalam Aspek Perkreditan.

perkreditan. Bahkan informasi terkait dengan perkreditan tidak dijelaskan secara transparan kepada petambak. Hal yang diketahui oleh petambak adalah besarnya kredit yang menjadi tanggungannya dan besarnya angsuran.

Pada penyaluran modal kerja dalam bentuk sarana produksi (saprodi) dan biaya hidup kepada petambak plasma, inti mendapat–kan manfaat keuangan dari keuntungan penya–luran saprodi. Apabila KUD dapat berperan secara nyata, kegiatan tersebut mestinya dapat ditangani olehnya dan keuntungan yang mungkin diperoleh dapat dirasakan pula manfaatnya oleh petambak.

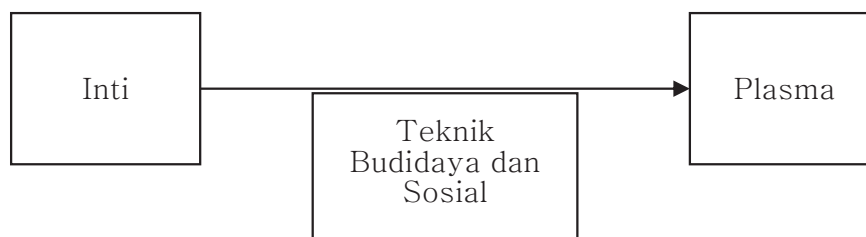
Berkaitan dengan modal kerja dan biaya hidup, terdapat fenomena yang menarik karena petambak menerima apa adanya terhadap harga yang diberikan oleh inti, meskipun hal tersebut dapat menambah beban kreditnya dan membuka kemungkinan bagi inti untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Hal ini menunjukkan bahwa petambak tidak mempedulikan beban kredit yang ditanggungnya asalkan kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi oleh inti. Sikap ini diduga kuat sebagai salah satu penyebab terlambatnya penyelesaian beban kredit yang ditanggung petambak.

Hal lain yang terkait dengan perkredit–an dan sempat menjadi masalah serius adalah isu sertifikat dan saldo positif, yang akan diambil semua

oleh plasma bagi plasma yang telah melunasi semua hutangnya kepada bank pelaksana dan inti. Masalah tersebut dapat mengancam keberlanjutan usaha kemitraan yang telah dibangun, karena memungkinkan lepasnya plasma dari keterikatannya dengan inti bila seluruh saldo dan sertifikat tanah dikuasai oleh petambak. Pemecahan yang telah disepakati, yaitu pemberian biaya hidup tambahan dan biaya hidup progresif yang di–dasarkan pada tingkat produksi tambak plasma. Pemecahan tersebut tampaknya hanya bersifat sementara dan lebih ditujukan untuk mengu–rangi kemungkinan terjadinya konflik yang lebih tajam antara inti dan plasma karena tidak ada pada perjanjian sebelumnya. Saat ini pihak inti dan plasma masih mendiskusikan addendum perjanjian. Hal ini seperti diungkap–kan oleh Bachriadi (1995), bahwa semakin kuatnya inti mengakibatkan tersisihnya plasma.

Pola Hubungan dalam Pembinaan

Pola hubungan yang terkait dengan pembinaan disajikan pada Gambar 2. Pada gambar tersebut tampak bahwa pembinaan petambak sepenuhnya dilaksanakan oleh inti. Pembinaan inti terhadap plasma dilakukan dengan sangat baik terutama dalam aspek teknis budidaya karena sifat udang yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan dan ketersediaan pakan, dalam pengertian kesalahan teknis budidaya yang terjadi dapat



Gambar 2. Kondisi Pola Hubungan pada TIR Udang dalam Aspek Pembinaan.



Gambar 3. Kondisi Pola Hubungan pada TIR Udang dalam Aspek Penjualan.

dengan petambak plasma karena konflik tersebut dapat merusak semua hasil pembangunan tambak yang ada.

Pada pembinaan, Dinas Perikanan tidak pernah memberikan pembinaan baik kepada inti maupun plasma karena dinas tersebut menganggap bahwa kemampuan teknis budidaya yang dimiliki inti dan ditularkan kepada plasma tidak perlu dibina. Dinas justru lebih memperhatikan pembinaan aspek sosial, meskipun pembinaan yang dilakukannya juga hanya bersifat insidental. Masalah di atas merupakan fenomena struktur dalam arti merupakan implikasi dari sifat instrinsik tatanan kelembagaan atau infrastruktur sistem kebijakan kelautan perikanan, sehingga harus dipandang sebagai kendala yang dihadapi (Simatupang, 2001).

Pola Hubungan dalam Penjualan

Pola hubungan yang terkait dengan penjualan disajikan pada Gambar 3. Pada aktivitas penjualan, penentuan harga jual udang dilakukan oleh inti bersama-sama dengan Dinas Perikanan. Fenomena ini hampir dapat ditemui pada setiap hubungan inti-plasma untuk usaha komoditas pertanian. Pada komoditas kelapa sawit yang dikembangkan melalui PIR Sawit, pola penjualan produk yang berupa Tandan Buah Segar (TDS) dari plasma kepada inti menggunakan harga

yang ditentukan oleh Forum Penetapan Harga. Forum tersebut beranggotakan inti dan pihak dinas terkait serta perwakilan petani. Pada praktiknya, kepentingan inti lebih mendominasi penentuan harga yang berlaku pada tiap periode. Demikian pula yang terjadi untuk komoditas susu pada pola inti-plasma PIR susu di Jawa Tengah pada tahun 1988. Proyek ini pada akhirnya gagal, sebagai akibat kerugian petani dengan adanya sistem penentuan harga susu yang ditentukan oleh perusahaan inti. Kasus serupa terjadi pula pada komoditas tebu melalui program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dengan penentuan harga beli gula (provenue) yang dilakukan sepihak oleh pemerintah (Bachriadi, 1995). Pada hubungan inti-plasma, penentuan harga jual produk pada umumnya didominasi oleh inti, sementara keterlibatan pihak plasma melalui perwakilan memiliki posisi lemah. Pihak inti dalam menentukan harga biasanya terlebih dahulu menentukan kriteria produk yang dapat diterimanya. Selanjutnya, dengan kriteria produk tersebut, inti menentukan harga. Posisi inti yang demikian telah menjadi bagian dari strategi inti untuk memperoleh keuntungan.

KESIMPULAN

1. Tingkat pendidikan plasma sampel

- dan menerima pembinaan dari inti. Inti telah melaksanakan tanggungjawab pembinaan atas hak plasma dengan sangat baik.
2. Pada KKPA dan CP Bahari, koperasi tidak dapat sebagai channeling agent karena dalam posisi sangat lemah (tidak ada dalam perjanjian inti dan plasma). Pada praktiknya, pencairan dana KLBI langsung ke inti (CP Bahari) dan belum pernah melewati koperasi. Pengurus koperasi tidak berusaha untuk memberdayakan koperasi, sehingga koperasi yang ada bukan koperasi seperti yang diharapkan dalam ketentuan KKPA.
 3. Tidak ada kelompok secara mandiri yang dibentuk oleh plasma, karena kelompok yang ada merupakan kelompok rukun tetangga (RT) yang bertugas membantu inti dalam mengawasi plasma dan ikut mengatasi masalah teknis bersama CD. Perusahaan cenderung ingin menafikan self help group (kelompok swadaya masyarakat), karena dianggap sebagai pressure yang akan sangat membahayakan perusahaan.
 4. Dinas Perikanan tidak rutin membina, dan pembinaan hanya bersifat sosial, terutama pada informasi harga udang yang telah ditetapkan bersama inti dan berjalan setelah ada gejolak. Pembinaan teknis tidak dilakukan. Pemda cenderung hanya mendiskusikan khususnya tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemotongan pajak yang berlebihan oleh Pemda terlalu memberatkan perusahaan (inti), yang akhirnya dibebankan pada plasma.
 5. Pada CP Bahari, bank sebagai penjamin adalah Bank Niaga, Bank International Indonesia, dan Vicor Invest (sudah tidak aktif lagi), yang cenderung hanya berhubungan dengan inti dan tidak ada pembinaan KUD. Belum adanya ketentuan tentang hak plasma yang melunasi hutangnya kepada inti dan bank.
 6. Pada P.T. Triastra Citarate, keberadaan koperasi hanya untuk mempercepat penyaluran kredit bank, dan secara operasi sebagai koperasi fiktif, karena semua pengurusnya karyawan perusahaan tersebut dan keberadaan koperasi tidak di tempat plasma berada (di Jakarta). Fungsi pengendalian dan pembinaan dari bank pelaksana dan Dinas Koperasi terhadap pelaksanaan KKPA tidak berjalan, sehingga inti melaksanakan KKPA sekehendaknya. Benefit monitoring evaluation (BME) selama proyek berjalan di masa mendatang mungkin akan sangat membantu bagi kelulusan berjalannya pelaksanaan sistem KKPA, karena secara dini penyimpangan akan segera diketahui.
 7. Diusulkan pengembangan model untuk masing-masing model hubungan yang saat ini sudah berjalan yaitu dengan pembentukan Task force yang terdiri atas dinas terkait, bank, tokoh masyarakat lokasi proyek, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan perusahaan inti. Legalitas Task force ditentukan dengan surat keputusan pemerintah daerah setempat. Tugasnya melakukan persiapan proyek.
 8. Pembentukan lembaga pendamping oleh pemerintah dengan mempertimbangkan masukan dari inti dan plasma. Legalitas lembaga pendamping ditetapkan dengan surat keputusan pemerintah daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, T., D.G. Begen dan J.I. Pariwono. 2002. Evaluasi Kesesuaian Kawasan Pesisir Teluk Palu untuk Pengembangan Pariwisata Bahari. *Jurnal Pesisir dan Lautan* 4(2):25–35.
- Bachriadi, D. 1995. Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital (Lima Kasus Intensifikasi Pertanian Dengan Pola Contract Farming). Akatiga, Bandung.
- Boardman, A.E. 1986. *Benefit Cost Analysis, Theory and Practice*. New Heaven, Yale University Press.
- Hale, L.Z. 2000. Achieving Integration in Coastal Management: The Challenge of Linking National and Local Levels of Government. *Jurnal Pesisir dan Lautan* 3(1):1–8.
- Holthus, P. 2000. Sustainable Development of Oceans and Coasts: The Role of Private Sector. *Jurnal Pesisir dan Lautan* 3(1):9–18.
- Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1986. Tentang Pedoman Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Myint, T.Z. and D.R. Monintja. 2002. Policy Analysis of Coastal Ecotourism Development on Muara Angke Mangrove Ecosystem Jakarta Bay, Indonesia. *Jurnal Pesisir dan Lautan* 4(2):9–24.
- Nikujuluw, V.P.H. 2001. Riset Sosial Ekonomi untuk Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Forum Riset Sosek. Kelautan dan Perikanan* 1. *Jurnal Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan* 1(1):27–40.
- Simatupang, P. 2001. Konsepsi Teoritis Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan. Puslitbang Sosek Deptan. *Forum Riset Sosek. Kelautan dan Perikanan* 1. *Jurnal Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan* 1(1):81–100.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 3/45/Kep/Dir. Tanggal 10 Juni 1998. Tentang Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA). Bank Indonesia, Jakarta.
- Taryoto, A. dan B. Rahman. 2001. Penelitian Kelembagaan Sosial Anthropologi Kelautan dan Perikanan: Beberapa Catatan Pokok Pikiran. Deptan. *Forum Riset Sosek. Kelautan dan Perikanan* 1. *Jurnal Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan* 1(1):49–57.
- Tomboelu, N., D.G. Begen, V.P.H. Nikijuluw, dan I. Idris. 2000. Analisis Kebijakan pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang Di